

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa skala daerah.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa skala daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa skala daerah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa skala daerah. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa skala daerah.
	3. Pengembangan Desa	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan batas desa skala daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa skala daerah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa skala daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa skala daerah.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Penetapan pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala daerah 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi anggota BPD. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi BPD skala daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala daerah.

1	2	3
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 3. Pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa skala daerah. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi pemerintah desa skala daerah. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa skala daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa skala daerah.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan skala daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala daerah.
	2. Pemantapan Data Profil Desa	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa skala daerah. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan data profil desa skala daerah.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.

1	2	3
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan skala daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala daerah.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala daerah.

1	2	3
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala daerah.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah. 3. Monitoring evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah.

1	2	3
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala daerah.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala daerah.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala daerah. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala daerah.

1	2	3
	4. Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi ,dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.
	5. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala daerah.
	6. Pemasarakatan dan Kerja sama Teknologi Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemasarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan skala daerah.